

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



BP2MI

BP3MI JAWA BARAT



**BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BP3MI) JAWA BARAT**

Jalan Soekarno – Hatta No. 587 Telp. 022-7333212/Fax. 022-7335965 Bandung 40287
e-mail : bp3mi.jabar@bp2mi.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat dapat diselesaikan dengan menggunakan pedoman penyusunan LAKIP yang baru berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP ini dibuat guna memenuhi kewajiban setiap unit satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran kepada atasan.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode LAKIP yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 11 Januari 2023

Kepala,



Erwin Rachmat, S.I.K.
KOMBES POL. NRP. 71110259



DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis	3
D. Permasalahan (<i>Issue Strategis</i>)	3
E. Maksud dan Tujuan	4
F. Ruang Lingkup	4
G. Personalia dan Organisasi	4
H. Dasar Pelaksanaan	6
I. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis UPT BP2MI Jawa Barat Tahun 2020-2024	10
B. Program dan Kegiatan	15
C. Penetapan Kinerja Tahun 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengelolaan Kinerja	21
B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022	24
C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	24
D. Akuntabilitas Keuangan	31
E. Kendala	33
F. Tindak Lanjut	35
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1. ASN BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 (Sesuai Penempatan)	6
Tabel 2. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BP3MI Jawa Barat	11
Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BP3MI Jawa Barat Tahun 2020-2024	12
Tabel 4. Target Kinerja BP3MI Jawa Barat	13
Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi BP3MI Jawa Barat Tahun 2020-2024	14
Tabel 6. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Penyiapan	16
Tabel 7. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Seksi Perlindungan	16
Tabel 8. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Sub Bagian Tata Usaha	17
Tabel 9. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	18
Tabel 10. Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022	19
Tabel 11. Reviu Target Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022	19
Tabel 12. Kategori Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022	21
Tabel 13. Pengukuran Capaian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 (Per Triwulan)	22
Tabel 14. Pengukuran Capaian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022	23
Tabel 15. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022	24
Tabel 16. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu	25
Tabel 17. Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua	29
Tabel 18. Indikator IKPA	30
Tabel 19. Revisi Anggaran Tahun 2022	31
Tabel 20. Realisasi Keuangan BP3MI Jawa Barat Tahun 2022	32
Tabel 21. Realisasi Keuangan BP3MI Jawa Barat Per Jenis Belanja Tahun 2022	33
Tabel 22. Realisasi Keuangan BP3MI Jawa Barat berdasarkan Belanja Tahun 2022	33



DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1. Struktur Organisasi BP3MI Jawa Barat	5

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPT BP2MI Bandung serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, semua pimpinan Instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja mulai eselon II ke atas secara berjenjang, maka disusunlah LAKIP BP3MI Jawa Barat Tahun 2022.

Menyikapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, BP3MI Jawa Barat ke depan menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dan harus semakin cermat dalam menyusun perencanaan agar lebih fokus, dan dapat menjawab berbagai persoalan.

Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan BP3MI Jawa Barat yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategi UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024, terdapat 12 sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1) Tersedianya Peta Potensi CPMI;
- 2) Meningkatnya Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2PMI;
- 3) Meningkatnya pelayanan PMI sejak pra-keberangkatan sampai dengan kepulangan menggunakan transaksi secara non tunai;
- 4) Meningkatnya pemahaman masyarakat (publik) tentang prosedur dan mekanisme penempatan dan Pencegahan PMI Non Prosedural;
- 5) Meningkatnya kepatuhan lembaga penempatan dan pendukung penempatan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pengaduan masalah PMI dilayani, diproses, dan diselesaikan;
- 7) Penguatan Advokasi dan Mediasi dalam memenuhi hak-hak PMI sejak Pra, masa dan purna;

- 8) Penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan;
- 9) Meningkatnya kemampuan PMI purna penempatan untuk mengelola keuangan, termasuk mengembangkan usaha mikro;
- 10) Fasilitasi Pelayanan Penanganan PMI Bermasalah;
- 11) Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, serta Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan;
- 12) Terwujudnya Organisasi, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Fungsi.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam pelayanan penempatan PMI, dinilai dari Indikator Kinerja Utama dan Peneiapan Kinerja (Tapkin) tahun 2022, yaitu:

- 1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional;
- 2) Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah;
- 4) Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia;
- 5) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya;
- 6) Nilai Capaian Kinerja Anggaran;
- 7) Nilai IKPA;
- 8) Nilai Zona Integritas;

Adapun ringkasan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	10.000 orang	12.356 orang	123,56
		Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%	4,74%	21,21
		Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	156 orang	312

NO	SASARAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	130 orang	203 orang	156,15
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	20 orang	20 orang	100
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96	70,03	72,95
		Nilai IKPA	86	95,68	111,26
		Nilai Zona Integritas	92	96,64	105,04

KENDALA

1. Seksi Penyiapan Penempatan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak PMI/CPMI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat PMI / memberikan info ke Keluarga PMI tentang permasalahan PMI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan P3MI untuk mediasi sangat sulit dikarenakan P3MI apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak P3MI yang tutup.
- 3) *Counter* Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan PMI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan PMI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat banyak yang belum mengetahui terkait prosedur Penempatan Kerja ke Luar Negeri.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website jobsinfo ([jobsinfo \(jobsinfo.bnp2tki.go.id\)](http://jobsinfo.bnp2tki.go.id)) dan cara menggunakannya.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.

TINDAK LANJUT

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan PMI Korea untuk mendapatkan data PMI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di beberapa lokasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website jobsinfo.bnp2tki.go.id kepada pencari kerja.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.



BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana stratejik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja BP3MI Jawa Barat pada tahun 2022. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan BP3MI Jawa Barat dan seluruh jajaran BP2MI dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05/KAI/2014 tentang Tugas, Fungsi dan uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BP3MI Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:



1. Tugas Pokok

BP3MI Jawa Barat diberikan tugas pokok yaitu *"Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Daerah di wilayah Propinsi Jawa Barat"*.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BP3MI Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, Pengembangan Program dan Anggaran;
2. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Penyelenggaraan Pemasarakatan Program Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Pelayanan Penerbitan Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (EKTCLN);
5. Pengumpulan data, Pembinaan Layanan Informasi serta Pembinaan Sistem dan Jaringan Informasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Pemberdayaan dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
7. Pelaksanaan Pemantauan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Penempatan;
8. Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia Penempatan oleh Pemerintah;
9. Monitoring Penyediaan dan Pelaksanaan Sertifikasi Calon Pekerja Migran Indonesia;
10. Pemantauan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri dan Promosi;
11. Pelaksanaan Fasilitas Penyelesaian Masalah Pekerja Migran Indonesia;
12. Fasilitas Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;



13. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
14. Penyusunan kelompok jabatan pengantar kerja;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

C. ASPEK STRATEGIS

Berkaitan dengan pencapaian target RPJM Tahun 2020-2024, ditetapkan pokok-pokok **strategi BP3MI Jawa Barat** yang difokuskan pada :

1. Unit Pelayanan Publik yang sudah memenuhi standar pelayanan;
2. Pemanfaatan jobs info BP2MI dalam alur proses penempatan PMI;
3. Penempatan TKLN memenuhi syarat kerja dan prosedur berbasis Sistem P2PMI;
4. Fasilitasi Pelayanan Pengaduan melalui Crisis Center;
5. Fasilitasi Pelayanan Perlindungan PMI melalui Mediasi dan Advokasi;
6. Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya.

D. PERMASALAHAN UTAMA (*ISSUE STRATEGIS*)

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius antara dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

1. Hasil Pemetaan Potensi CPMI yang dilakukan oleh BP3MI Jawa Barat masih merupakan data mentah dan belum spesifik mengarah pada Peta CPMI.
2. Belum adanya potret daerah yang dapat digunakan dalam pembuatan model penyuluhan/sosialisasi.
3. Perlunya Bimbingan Teknis Petugas Penyuluh dalam rangka Peningkatan SDM.
4. Pemanfaatan Jobs Info masih belum sempurna, karena Petugas Jobs Info tidak dapat mengetahui berapa orang Jawa Barat yang telah mengakses ke Jobs Info.
5. Koneksi Jaringan (internet) yang tidak stabil mempengaruhi akses ke SISKOTKLN.



6. Realisasi Penempatan berbeda dengan realisasi PAP, karena PMI Cuti dan Re-Entry tidak mengikuti PAP sedangkan itu menjadi angka realisasi penempatan.
7. Permasalahan kasus terhadap PMI yang habis kontrak namun masih dipertahankan oleh majikan sedangkan keluarga dan PMI tersebut ingin pulang. BP3MI Jawa Barat sudah berkirim surat ke Kementerian Luar Negeri namun surat tersebut tidak ditanggapi.
8. Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan tidak ada anggaran monitoring walaupun lewat telepon tetapi tidak maksimal.
9. Tidak adanya anggaran untuk Identifikasi peserta Edukasi Pemberdayaan Kewirausahaan sehingga peserta yang diinginkan sesuai PERKA Badan tidak bisa dipenuhi.
10. Perlunya Bimbingan Teknis Evaluator Akuntabilitas Kinerja.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disebut LAKIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil-hasil yang telah dicapai dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun agar diketahui oleh pimpinan dan masyarakat serta sebagai dasar dalam menentukan langkah yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pemerintahan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan hasil-hasilnya dari pelaksanaan program dan kegiatan BP3MI Jawa Barat yang tertib, teratur dan efisien untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

F. RUANG LINGKUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun oleh BP3MI Jawa Barat mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan khususnya tugas dan fungsi dalam lingkup pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Barat.

G. PERSONALIA DAN ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BP3MI Jawa Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI BP3MI JAWA BARAT

2. Jumlah Pegawai

BP3MI Jawa Barat pada tahun 2022 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 40 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
ASN BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

No	Unit Kerja	ESELON												Jumlah	FUNGSIONAL			NON STRUKTURAL			Ket
		I		II			III			IV			L		P	Jml	L	P	Jml		
		L	P	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	BP3MI Jawa Barat	-	-	-	-	0	1	-	1	1	-	1	2	3	4	7	7	6	13		
2	P4MI Bekasi	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	1	4	5		
3	P4MI/LTSA Cirebon	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	1	-	1	-	3	3		
4	P4MI/LTSA Sukabumi	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	1	1	2		
5	LTSA Indramayu	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	2	1	3		
6	LTSA Karawang	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-	1	1		
7	LTSA Subang	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	1	-	1	1	-	1		
8	LTSA Kab. Bandung	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-	1	1		
	Jumlah	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	5	4	9	12	17	25		

H. DASAR PELAKSANAAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 didasarkan pada Rencana Strategis BP3MI Jawa Barat Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu:

1. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 39 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi



- Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden R.I. Nomor 165 Tahun 2015 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 339);
 9. Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI;
 12. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01/KA-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10/KA/IV/2012 tanggal 20 April 2012;
 14. Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 15. Keputusan Kepala UPT BP2MI Jawa Barat Nomor KEP.46/BP3TKI-6/VII/2020 tentang Rencana Strategis UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024;
 16. Keputusan Kepala UPT BP2MI Jawa Barat Nomor KEP.32/BP3TKI-6/II/2022 tentang Penetapan Kinerja UPT BP2MI Jawa Barat Tahun 2022;
 17. Keputusan Kepala UPT BP2MI Jawa Barat Nomor KEP.33/BP3TKI-6/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama UPT BP2MI Jawa Barat Tahun 2022.



I. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi, aspek strategis, permasalahan utama (*issue* strategis), maksud dan tujuan, ruang lingkup, organisasi dan personalia, dasar pelaksanaan dan sistematika penyajian.

Bab II – Perencanaan Kinerja

- A. Menjelaskan Rencana Strategis UPT BP2MI Jawa Barat yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja, Target Kinerja tahun 2022, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan;
- B. Menjelaskan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menjelaskan pengelolaan kinerja berupa

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, sesuai Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Jawa Barat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis UPT BP2MI Jawa Barat 2020 – 2024, Program dan Kegiatan dan Perjanjian Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat tahun 2022.

A. RENCANA STRATEGIS UPT BP2MI JAWA BARAT 2020 - 2024

Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Jawa Barat 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah BP3MI Jawa Barat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3MI Jawa Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra UPT BP2MI Jawa Barat telah mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah BP3MI Jawa Barat maupun *stakeholder* eksternal. Laporan Kinerja ini mengacu Renstra Tahun 2020-2014 tetapi beberapa Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama masih mengacu kepada Renstra Tahun 2015-2019. Secara ringkas substansi BP3MI Jawa Barat dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi BP3MI Jawa Barat yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu :

BP3MI Jawa Barat yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang beradab, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong



2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, BP3MI Jawa Barat menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP3MI Jawa Barat.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BP3MI Jawa Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2024 yaitu:

Tabel 2
Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan BP3MI Jawa Barat

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN
Terwujudnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa	Meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya
	Persentase CPMI/PMI bermasalah yang mendapat pendampingan hukum
Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
	Nilai AKIP UPT BP2MI

4. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan atas tujuan tersebut, selanjutnya BP3MI Jawa Barat akan menjabarkan dalam sasaran-sasaran program/kegiatan (Sasaran Strategis) yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Program/Kegiatan dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020 – 2024. Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB, dan APIP BP2MI atas SAKIP BP2MI perlu dilakukan penyeragaman Indikator Kinerja Utama (IKU) BP3MI. Saat ini IKU BP3MI masih menggunakan IKU BP3TKI, sehingga IKU BP3MI belum selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BP2MI. Adapun IKU BP3MI yang disesuaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BP3MI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran
	Nilai IKPA
	Nilai Zona Integritas

5. Target Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Strategis UPT BP2MI Jawa Barat Tahun 2020-2024, target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Target Kinerja BP3MI Jawa Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.500 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	100 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	190 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	420 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96
	Nilai IKPA	86
	Nilai Zona Integritas	92

6. Arah Kebijakan dan Strategi

Penyusunan Rencana Strategis sejauh mungkin telah diupayakan dapat mengakomodasikan kebutuhan *stakeholders*, baik internal BP2MI maupun instansi lain atau masyarakat umum sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban serta mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Arah kebijakan yang akan dilakukan BP3MI Jawa Barat dalam mendukung terciptanya *clean government dan good governance* sebagaimana matrik berikut ini

:

Tabel 5
Arah Kebijakan Dan Strategi BP3MI Jawa Barat Tahun 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia non prosedural	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan edukasi, propaganda, dan sosialisasi secara massif untuk memerangi <i>human trafficking</i> b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberantasan sindikasi Pekerja Migran Indonesia non prosedural c. Monitoring di penampungan P3MI dan Lembaga Pendukung Penempatan serta di debarkasi dan embarkasi d. Penguatan pengawasan P3MI, dengan cara memberikan peringatan serta rekomendasi skorsing dan pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) e. Simplifikasi proses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, cepat dan transparan f. Meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen g. Meningkatkan koordinasi dan peran daerah hingga ke desa dalam melakukan upaya bersama meminimalisir kasus Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen h. Meningkatkan dan menambah jumlah paralegal yang ada di daerah hingga ke desa
Menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai <i>Very Very Important Person (VVIP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memaksimalkan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya b. Penguatan <i>help desk & lounge</i> di bandara dan pelabuhan laut melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga terkait c. Pengawasan jaminan <i>social Cost Structure</i>
Peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kompetensi/kapasitas Pekerja Migran Indonesia b. Pemetaan <i>demand</i> pasar kerja dan <i>supply</i> yang ditindaklanjuti dengan harmonisasi c. Sosialisasi dan diseminasi informasi peluang kerja terampil dan profesional di luar negeri d. Penguatan skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (<i>G to G, G to P, P to P, UKPS, dan Mandiri</i> termasuk <i>SP2T, SSW dan SPSK</i>)



ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penurunan jumlah Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> beresiko tinggi	<ol style="list-style-type: none">Mengarahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia <i>low skilled</i> ke negara tujuan penempatan yang memiliki hukum ketenagakerjaanMeningkatkan kampanye penyadaran public untuk pilihan bekerja di luar negeriMemonitor penetapan standar minimum yang layak, upah dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeriMenyederhanakan alur proses penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri
Peningkatan Purna Pekerja Migran Indonesia produktif dan reintegrasi social Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas usaha PMI dan keluarga melalui kegiatan edukasi yang dibutuhkan oleh PMI Purna dan keluarga yang sudah dilatihKegiatan pemberdayaan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktifMemperkuat kapasitas masing-masing CO dari Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) yang sudah di bentuk dan memperluas program Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM)
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penguatan kelembagaan, serta Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none">Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah sebagai kepanjangan tangan BP2MI untuk memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran IndonesiaPenguatan kelembagaan (program dan anggaran)Penguatan kapasitas dan infrastruktur SDMPengembangan sarana dan prasaranaPeningkatan citra BP2MI (<i>image building/branding</i>)Pengembangan sistem informasiPeningkatan pelaksanaan Reformasi BirokrasiPeningkatan kualitas pelayanan publikPenyelarasan regulasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran IndonesiaPeningkatan pengendalian dan pembinaan akuntabilitas BP2MI

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

BP3MI Jawa Barat melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan BP2MI secara keseluruhannya itu Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.



Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3MI Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Seksi Penyiapan Penempatan

Seksi Penyiapan Penempatan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 6
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Seksi Penyiapan Penempatan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.500 orang
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3MI JAWA BARAT Rp. 1.516.125.000,-		
Program Penempatan dan Pelindungan PMI		

b. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, bertanggungjawab pada Sasaran Program/kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 7
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya pelindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	100 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	190 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	420 orang
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3MI JAWA BARAT Rp. 439.630.000,-		
Program Penempatan dan Pelindungan PMI		

c. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha, bertanggungjawab pada Sasaran Program/ kegiatan dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 8
Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96
	Nilai IKPA	86
	Nilai Zona Integritas	92
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3MI JAWA BARAT Rp. 9.583.381.000,-		
Program Dukungan Manajemen		

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE:/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan inerja Pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujudnya nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

BP3MI Jawa Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra UPT BP2MI Jawa Barat tahun 2020 – 2024.

Penetapan Kinerja tingkat BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja Tahunan BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP3MI Jawa Barat tahun 2022 mengacu pada Renstra UPT BP2MI Jawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana Keputusan Kepala UPT BP2MI Jawa Barat Nomor.KEP.46/BP3TKI-6/VII/2020, sebagai berikut:

Tabel 9
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.500 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	100 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	190 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	420 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96
	Nilai IKPA	86
	Nilai Zona Integritas	92

2. Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

Untuk melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan BP3MI Jawa Barat Tahun 2022, telah dibuat Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 sesuai Keputusan Kepala UPT BP2MI Jawa Barat Nomor : KEP.32/BP3TKI-6/II/2022 tentang Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022. Adapun Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 10
Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.500 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	100 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	190 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	420 orang
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96
	Nilai IKPA	86
	Nilai Zona Integritas	92
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3MI JAWA BARAT Rp. 11.539.136.000,-		
Program Penempatan dan Pelindungan PMI dan Program Dukungan Manajemen		

Karena adanya pencermatan dan refofusing Tahun 2022, maka terjadi perubahan target pada Penetapan Kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 11
Reviu Target Penetapan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	10.000 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	130 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	20 orang



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96
	Nilai IKPA	86
	Nilai Zona Integritas	92
JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3MI JAWA BARAT Rp. 11.539.136.000,-		
Program Penempatan dan Pelindungan PMI dan Program Dukungan Manajemen		

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Perencanaan strategis dan pengukuran kinerja serta Analisis capaian kinerja merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BP3MI Jawa Barat.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada BP3MI Jawa Barat menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja sebagai berikut:

Tabel 12
Kategori Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

No.	Kategori	RentangNilai	Kode
1.	Sangat Baik	> 100	Biru
2.	Baik	80 – 100	Hijau
3.	Cukup	50 – 79	Kuning
4.	Kurang	< 49	Merah

Proses penghitungan kinerja menggunakan Informasi Indikator Kinerja (IIK) yang telah ditetapkan sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Penilaian kinerja pada BP3MI Jawa Barat dilakukan selama 1 tahun. Secara rinci hasil penilaian kinerja BP3MI Jawa Barat sebagaimana tabel berikut ini :



Tabel 13
Pengukuran Capaian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022
(Per Triwulan)

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	
Kementerian/Lembaga	: BP2MI
Unit Kerja	: BP3MI Jawa Barat
Pagu Anggaran	: Rp. 11.539.136.000,-; Realisasi Anggaran: Rp. 11.406.660.457,- atau 98,85%
Program	: Program Penempatan dan Perlindungan PMI dan Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	10.000 orang	2.500 orang	1.735 orang	2.500 orang	3.612 orang	2.500 orang	2.771 orang	2.500 orang	4.238 orang
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%	22,35%	25,12%	22,35%	23,25%	22,35%	52%	22,35%	29,72%
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	12 orang	7 orang	12 orang	0 orang	13 orang	74 orang	13 orang	149 orang
	Fasilitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia	130 orang	30 orang	75 orang	30 orang	41 orang	35 orang	58 orang	35 orang	87 orang
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Pertama dan keluarganya	20 orang	-	-	20 orang	20 orang	-	-	-	-
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96	96	17,62	96	30,90	96	49,05	96	70,03
	Nilai IKPA	86	86	59,51	86	90,45	86	95,23	86	95,68
	Nilai Zona Integritas	92	92	88,03	92	96,64	92	96,64	92	96,64



Tabel 14
Pengukuran Capaian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	
Kementerian/Lembaga	: BP2MI
Unit Kerja	: BP3MI Jawa Barat
Pagu Anggaran	: Rp. 11.539.136.000,-; Realisasi Anggaran: Rp. 11.406.660.457,- atau 98,85%
Program	: Program Penempatan dan Perlindungan PMI dan Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran (Dalam Rupiah)		
					Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	10.000 orang	12.356 orang	123,56	1.901.655.425	1.499.193.264	78,84
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%	4,74%	21,21	306.810.000	277.313.310	90,39
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	156 orang	312			
	Fasilitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia	130 orang	203 orang	156,15	74.310.000	66.298.062	89,22
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Puma dan keluarganya	20 orang	20 orang	100	58.510.000	55.161.779	94,28
	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96	70,03	72,95	8.911.446.000	8.850.400.473	80,51
	Nilai IKPA	86	95,68	111,26			
	Nilai Zona Integritas	92	96,64	105,04	671.935.000	659.218.941	98,31

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam pelaksanaannya Evaluasi Capaian Kinerja pada BP3MI Jawa Barat menggunakan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) yang dibuat berdasarkan rentang nilai kinerja. Secara rinci hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 15
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	%
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	10.000 orang	12.356 orang	123,56
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%	4,74%	21,21
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	156 orang	312
	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	130 orang	203 orang	156,15
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	20 orang	20 orang	100
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96	70,03	72,95
	Nilai IKPA	86	95,68	111,26
	Nilai Zona Integritas	92	96,64	105,04

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk melakukan Analisis Capaian Kinerja pada BP3MI Jawa Barat dilakukan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya akan didapat persentasi naik atau turun. Adapun Analisis Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. **Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kesatu**
Meningkatnya Pelindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Tabel 16
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kesatu
Tahun 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1.	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	32.000 orang	4.722 orang	14,76	10.000 orang	12.356 orang	123,58
2.	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	18,03%	75,11%	416,58	22,35%	4,74%	21,21
3.	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	94 orang	188	50 orang	156 orang	312
4.	Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	105 orang	210 orang	200	130 orang	203 orang	156,15
5.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	140 orang	140 orang	100	20 orang	20 orang	100

1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional

Jumlah target fisik Penempatan PMI terampil dan profesional Tahun Anggaran 2022 BP3MI Jawa Barat adalah 32.000 orang. Namun terdapat reviu target karena menyesuaikan dengan jumlah target fisik yang tercantum pada POK tahun 2022 yaitu menjadi 10.000 PMI. Sedangkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 12.356 orang atau 123,56%. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/1651/PK.02.02/VI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, terdapat 53 negara tujuan penempatan yang dibuka kembali bagi penempatan PMI, sehingga berpengaruh besar terhadap pencapaian target penempatan PMI terampil dan profesional.

Sehubungan dengan penyesuaian/reviu Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Jawa Barat Tahun 2020 – 2024, bersama dengan itu terdapat beberapa perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama beserta jumlah targetnya. Dalam hal ini, untuk capaian Indikator Kinerja Utama yang melekat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program tidak tercantum dalam Renstra, melainkan hanya mendukung capaian Indikator



Kinerja Utama Seksi Penyiapan Penempatan. Hal ini dikarenakan pada RKA-KL anggaran kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan melekat di anggaran kegiatan Seksi Penyiapan Penempatan.

Adapun capaian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan pada tahun 2022 adalah kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman sebanyak 7 lokasi dan kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan sebanyak 8 lokasi. Total terdapat 15 kegiatan sosialisasi dengan rincian sebagai berikut :

- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di Graha Wirakarya, Kab. Ciparay, Kab Bandung pada tanggal 5 Februari 2022;
- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di Kantor Desa Cihampelas Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 6 Februari 2022;
- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di GOR Soka, Kecamatan Arjasari, Kab. Bandung pada tanggal 29 Triwulan I 2022;
- Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Gedung Islamic Center Cisaat, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi pada tanggal 21 April 2022;
- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di Aula Pondok Pesantren Sulalatul Huda Jln. Paseh Bojongsari No.18 Rt.002/009, Kel. Tugujaya, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya pada tanggal 18 Mei 2022;
- Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Aula Lembah Gunung Kujang Subang Jl. Raya Gunung Tua No. 11 KM 8 Gunung Tua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang pada tanggal 20 Mei 2022;
- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di Aula Pondok Pesantren Assalafie, Ds. Babakan Kec. Ciwaringin, Kab. Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 19 Juni 2022;
- Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Aula Lembah Gunung Kujang Subang Jl. Raya Gunung Tua No. 11 KM 8 Gunung Tua Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang pada tanggal 10 Juni 2022.
- Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Balai Desa Ciracas, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 02 Agustus 2022;



- Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Balai Desa Cibinong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 20 Agustus 2022;
- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di SMK Karya Pembangunan, Jl. Adipati Agung No. 32, Baleendah, Kabupaten Bandung pada tanggal 31 Agustus 2022;
- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di Aula Kampus Institut Pendidikan Indonesia, Kabupaten Garut pada tanggal 14 September 2022;
- Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Gedung Aula Serbaguna Desa Jambak, Kecamatan Cikeding, Kabupaten Indramayu pada tanggal 22 Oktober 2022;
- Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di Desa Kunci Wetan, kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2022;
- Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI di Kantor Kepala Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi pada tanggal 10 November 2022.

2) Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia

Dalam hal ini yang dimaksud kasusnya adalah pengaduan yang diterima langsung oleh BP3MI Jawa Barat. Menurunnya permasalahan CPMI/PMI terjadi dikarenakan BP3MI Jawa Barat selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan CPMI/PMI dengan memanggil para pihak untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak PMI. Jumlah pengaduan yang terdaftar di Crisis Center BP3MI Jawa Barat untuk Tahun 2022 berjumlah 1.106 kasus. Terdiri dari 1.012 kasus berupa surat masuk dan 94 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka). Semakin tertatanya proses penempatan dan perlindungan PMI sehingga permasalahan-permasalahan PMI di Luar Negeri menjadi berkurang. Kasus PMI terdapat penurunan sebesar 4,74%.

3) Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah

Pekerja Migran Indonesia non prosedural yang berhasil dicegah merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru tercantum dalam Renstra UPT BP2MI Jawa



Barat yang sudah disesuaikan dengan Renstra BP2MI. Sehingga pada tahun 2021 target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Pekerja Migran Indonesia non prosedural yang berhasil dicegah masih belum ada angkanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan PMI nonprosedural terindikasi sebagai korban TPPO adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur penempatan PMI yang benar. Jumlah target Pekerja Migran Indonesia non prosedural yang berhasil dicegah Tahun Anggaran 2022 adalah 50 orang. Sedangkan realisasi pada Tahun 2022 kegiatan Pencegahan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara nonprosedural di wilayah BP3MI Jawa Barat maupun yang dipulangkan ke daerah asal sebanyak 156 orang atau sebesar 312%. Berdasarkan persentase realisasi tahun 2022 yang melebihi 3 kali target, diharapkan untuk tahun 2023 targetnya bisa ditambahkan.

4) Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia

BP3MI Jawa Barat memiliki Pos Pelayanan Pendataan Kepulangan dan Keberangkatan PMI di Debarisasi Embarkasi Bandara Husein Sastranegara Bandung yang selalu melakukan pendataan PMI yang kepulangannya bermasalah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya. Jumlah target fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan realisasi kegiatan tahun 2021 melebihi target. Sehingga untuk target fasilitasi pemulangan PMI tahun 2022 menjadi 130 orang. Sedangkan realisasi pelayanan pemulangan PMI nonprosedural/terkendala dilakukan di Pos Pelayanan BP3MI Jawa Barat yang berada di Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati Majalengka untuk Tahun 2022 terdapat 203 orang (sebesar 156,15%) PMI terkendala yang didampingi dan difasilitasi biaya transportasi pemulangan ke daerah asal, termasuk PMI meninggal, PMI sakit dan PMI terkendala.

5) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya

Jumlah target Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Keluarganya pada tahun 2022 menurun dibandingkan jumlah target tahun



2021 dari 140 orang menjadi 20 orang. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid-19, sehingga realisasinya pun nihil. Untuk tahun 2022 kegiatan ini kembali dilaksanakan dengan adanya perubahan skema pelatihan kewirausahaan dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dibatasi. Pada tahun 2022 ini, terdapat pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BP3MI Jawa Barat – Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 17 Juni 2022 di Kabupaten Cianjur kepada 20 orang peserta pelatihan, dengan jenis pelatihan kuliner aneka minuman sehat.

2. Capaian Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Kedua Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel 17
Perbandingan Capaian Sasaran Program/Kegiatan Kedua
Tahun 2021 dan 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1.	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	95	88,99	93,67	96	70,03	72,95
2.	Nilai IKPA	84	97,79	116,42	86	95,68	111,26
3.	Nilai Zona Integritas	90	88,03	97,81	92	96,64	105,04

1) Nilai Capaian Kinerja Anggaran

Nilai capaian kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran tingkat satuan kerja pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Perhitungan nilai capaian kinerja anggaran merupakan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL yang terdapat pada SMART Kementerian Keuangan. Indikator kinerja ini baru tercantum pada Reviu Renstra UPT BP2MI Jawa Barat tahun 2021. Jumlah target nilai Capaian Kinerja Anggaran BP3MI Jawa Barat tahun anggaran 2022 adalah 96. Sedangkan realisasi nilai capaian kinerja anggaran pada Tahun 2022 masih rendah yaitu sebesar 70,03 atau 72,95%.



2) Nilai IKPA

Sama halnya dengan nilai capaian kinerja anggaran, nilai IKPA juga merupakan indikator kinerja yang baru tercantum dalam Renstra UPT BP2MI Jawa Barat tahun 2022. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Jumlah target nilai IKPA BP3MI Jawa Barat tahun anggaran 2022 adalah 86. Sedangkan realisasi nilai IKPA Tahun 2022 adalah 95,68 atau 111,26%. Adapun nilai IKPA didapatkan dari 8 (delapan) indikator kinerja, berikut indikator dan nilai indikatornya :

Tabel 18
Indikator IKPA

NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR
1.	Revisi DIPA	100
2.	Deviasi Halaman III DIPA	80,20
3.	Penyerapan Anggaran	100
4.	Belanja Kontraktual	92,86
5.	Penyelesaian Tagihan	94,74
6.	Pengelolaan UP dan TUP	93,96
7.	Dispensasi SPM	100
8.	Capaian Output	98,00

3) Nilai Zona Integritas

Pada tahun 2019 BP3TKI Bandung mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Instansi yang berpredikat wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur dari BP3TKI Bandung menjadi BP3MI Jawa Barat dan sedang proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Nilai Zona Integritas BP3MI Jawa Barat tahun ini sebesar 96,64. Dengan nilai tersebut bisa diajukan untuk penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh Menpan RB. Untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menjadi



WBBM perlu menambahkan dan melengkapi beberapa sarana prasarana yang menunjang pelayanan maksimal tetapi masih belum ada anggarannya. Sedangkan untuk pemenuhan Bukti Dokumen ZI masih terus di *update* datanya untuk di *upload* ke *Google Drive*.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP3MI Jawa Barat ditunjang dengan anggaran yang berasal dari DIPA awal tahun 2022 sebesar Rp.12.990.265.000,- yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2021, namun sampai bulan Desember 2022 terdapat beberapa kali Revisi Anggaran diantaranya sebagai berikut :

Tabel 19
Revisi Anggaran Tahun 2022

Revisi	Tanggal	Anggaran		Keterangan
		Semula	Menjadi	
01	17 Desember 2021	Rp. 12.990.265.000,-	Rp. 12.990.265.000,-	Pemblokiran Belanja Pegawai
02	17 Februari 2022	Rp. 12.990.265.000,-	Rp. 12.990.265.000,-	Revisi DIPA
03	21 Maret 2022	Rp. 12.990.265.000,-	Rp. 12.990.265.000,-	Pembukaan Blokir Sewa Rumah Dinas
04	22 Juni 2022	Rp. 12.990.265.000,-	Rp. 12.990.265.000,-	Revisi DJA
05	15 Juli 2022	Rp. 12.990.265.000,-	Rp. 12.990.265.000,-	Self Blocking
06	19 September 2022	Rp. 12.990.265.000,-	Rp. 11.921.323.000,-	Revisi DJA
07	14 Oktober 2022	Rp. 11.921.323.000,-	Rp. 11.674.136.000,-	Revisi DJA
08	25 November 2022	Rp. 11.674.136.000,-	Rp. 11.674.136.000,-	Revisi Kanwil
09	5 Desember 2022	Rp. 11.674.136.000,-	Rp. 11.539.136.000,-	Automatic Adjustment
10	26 Desember 2022	Rp. 11.539.136.000,-	Rp. 11.539.136.000,-	Revisi Pagu Minus

Adapun realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 11.406.660.457,- atau 98,85%. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 13.277.856.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.965.922.239,- (97,65%) maka terjadi peningkatan sebesar 1,2%.

Secara keseluruhan kegiatan penyerapan anggaran pada BP3MI Jawa Barat tahun 2022 relatif tinggi dengan penyerapan sebesar 76,59% dari jumlah target 75%. Adapun penyerapan yang paling tinggi terdapat pada kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Penempatan PMI non Pemerintah dengan persentase



99,79% dikarenakan kegiatan ini sudah dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dan hanya ada sedikit sisa dari anggaran awal. Sedangkan penyerapan yang paling rendah terdapat pada kegiatan Penguatan Helpdesk dan Lounge dengan persentase 89,22% dikarenakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di Bandara Husein Sastranegara Bandung tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan sudah tidak terdapat pos pelayanan pemulangan PMI sehingga pelayanan pemulangan dilaksanakan di Kantor BP3MI Jawa Barat.

Tabel 20
Realisasi Keuangan BP3MI Jawa Barat Tahun 2022

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022				
KEMENTERIAN/LEMBAGA	:	BP2MI		
UNIT KERJA	:	BP3MI JAWA BARAT		
TAHUN ANGGARAN	:	2022		
KEGIATAN/KOMPONEN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
Penyebarluasan Informasi Penempatan dan Pelindungan PMI				
1. Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan PMI	656.765.000	647.805.128	98,64	8.959.872
2. Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman	406.800.000	400.322.619	98,41	6.477.381
3. Focus Group Discussion (FGD)	66.200.000	66.535.112	99,00	664.888
Layanan Umum				
1. Layanan Tata Usaha Satker	621.935.000	609.718.941	98,04	12.216.059
Layanan Prasarana Internal				
1. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.500.000	99,00	500.000
Pelayanan Penempatan PMI Non Pemerintah				
1. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Penempatan PMI non Pemerintah	386.360.000	385.530.425	99,79	829.575
Pelayanan Pelindungan terhadap PMI				
1. Penanganan PMI Bermasalah, Sakit dan Meninggal	267.010.000	239.602.370	89,74	27.407.630
2. Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus CPMI/PMI	39.800.000	37.710.940	94,75	2.089.060
3. Penguatan Helpdesk dan Lounge	74.310.000	66.298.062	89,22	8.011.938
Pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya				
1. Pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya	58.510.000	55.161.779	94,28	3.348.221
Layanan Perkantoran				
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4.157.616.000	4.143.030.733	99,65	14.585.267
2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.753.830.000	4.707.369.740	99,02	46.460.260

Tabel 21
Realisasi Keuangan BP3MI Jawa Barat Per Jenis Belanja Tahun 2022

REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022 PER JENIS BELANJA				
MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	11.539.136.000	11.406.660.457	98,86	132.475.543
A. Belanja Pegawai	4.157.616.000	4.142.105.341	99,65	15.510.659
B. Belanja Barang/Jasa	7.331.520.000	7.215.055.116	98,41	116.464.884
C. Belanja Modal	50.000.000	49.500.000	99,00	500.000

Tabel 22
Realisasi Keuangan BP3MI Jawa Barat berdasarkan Belanja Tahun 2022

REKAPITULASI REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022 PER BELANJA					
KODE	MATA ANGGARAN	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA
51	Belanja Pegawai	4.157.616.000	4.142.105.341	99,63	15.510.659
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.423.556.000	2.419.139.420	99,82	4.416.580
5122	Belanja Lembur	57.749.000	57.735.000	99,98	14.000
5124	Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.676.311.000	1.665.230.921	99,34	11.080.079
52	Belanja Barang	7.331.520.000	7.215.055.116	98,41	116.464.884
5211	Belanja Barang Operasional	2.713.651.000	2.686.617.021	99,08	25.033.979
5212	Belanja Barang Non Operasional	1.027.703.000	1.003.988.690	97,69	23.714.310
5218	Belanja Barang Persediaan	96.300.000	96.007.220	99,70	292.780
5221	Belanja Jasa	1.739.002.000	1.723.299.060	99,10	15.702.940
5231	Belanja Pemeliharaan	356.950.000	353.250.111	98,96	3.699.889
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.397.914.000	1.349.893.014	96,56	48.020.986
53	Belanja Modal	50.000.000	49.500.000	99,00	500.000
5331	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	50.000.000	49.500.000	99,00	500.000

E. KENDALA

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :



- 1) Dengan diberlakukannya sistem Finger Print pada Penerbitan E-KTKLN (tidak ada fisik berupa Kartu) masih banyak PMI/CPMI yang mempertanyakan bukti bahwa E-KTKLN telah selesai diproses.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kesulitan dalam menangani kasus mencari alamat PMI / memberikan info ke Keluarga PMI tentang permasalahan PMI dikarenakan tidak ada anggaran.
- 2) Pemanggilan P3MI untuk mediasi sangat sulit dikarenakan P3MI apabila dipanggil jarang yang datang bahkan banyak P3MI yang tutup.
- 3) *Counter* Bandara di Husein Sastranegara sudah tidak ada sehingga mengakibatkan pendataan keberangkatan dan kepulangan PMI tidak maksimal.
- 4) Edukasi kewirausahaan harus melibatkan mantan PMI Korea yang agak sulit untuk mendapatkannya dan kebanyakan sudah memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat banyak yang belum mengetahui terkait prosedur Penempatan Kerja ke Luar Negeri.
- 2) Masyarakat pencari kerja banyak yang belum mengetahui terkait adanya website [jobsinfo \(jobsinfo.bnp2tki.go.id\)](http://jobsinfo.jobsinfo.bnp2tki.go.id) dan cara menggunakannya.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Kendala dalam pelaksanaan Tupoksi yang terdapat pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Masuknya Laporan dari setiap Seksi dan Satuan Kerja daerah masih sering terlambat.



F. TINDAK LANJUT

1. Seksi Penyiapan dan Penempatan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Penyiapan dan Penempatan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas memberikan penjelasan kembali mengenai kebijakan tentang perubahan KTKLN menjadi E-KTKLN.

2. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan Disnakertrans / P4TKI / LTSP walaupun info yang didapat agak terlambat.
- 2) Membuat surat ke Kedutaan walaupun jarang ada balasan.
- 3) Sudah menemui pihak-pihak yang berkepentingan dan juga untuk sementara Petugas Pendataan menunggu di depan pintu keluar.
- 4) Mencari informasi ke para mantan PMI Korea untuk mendapatkan data PMI Korea yang belum memiliki usaha sendiri.

3. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program adalah sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di beberapa lokasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 2) Menjelaskan prosedur mendaftar melalui website jobsinfo.bnp2tki.go.id kepada pencari kerja.

4. Sub Bagian Tata Usaha

Rekomendasi sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dengan setiap seksi-seksi untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan.

**BAB IV - PENUTUP****A. KESIMPULAN**

1. BP3MI Jawa Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi semua pihak terutama masyarakat Propinsi Jawa Barat dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, BP3MI Jawa Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Program Kerja, Penetapan Kinerja antara Kepala BP2MI dengan Kepala BP3MI Jawa Barat maupun Rencana Strategis (Renstra) UPT BP2MI Bandung Tahun 2020-2024;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3MI Jawa Barat Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BP3MI Jawa Barat pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pelayanan Teknis di BP3MI Jawa Barat secara umum sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pelayanan Penempatan mulai dibuka kembali pada bulan Juni tahun 2020 secara terbatas sehingga jumlah Pelayanan Penempatan masih rendah sampai akhir tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang membatasi Penempatan ke luar negeri. Namun, saat ini jumlah Pelayanan Penempatan mulai meningkat kembali dikarenakan beberapa Negara Penempatan sudah membuka kembali lowongan pekerjaan.
 - b. Hampir serupa dengan kondisi pelayanan penempatan yang diberhentikan sementara waktu, tidak semua jenis pelayanan



perlindungan diberhentikan ada beberapa pelayanan kasus PMI Bermasalah yang masih dilakukan tetapi hanya sebatas penerimaan pelayanan kasus PMI Bermasalah melalui surat secara online. Hal ini menyebabkan persentase jumlah pelayanan perlindungan sampai akhir 2021 pun belum maksimal. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pelayanan perlindungan meningkat secara drastis, dikarenakan banyak PMI bermasalah yang dipulangkan ke Indonesia.

- c. Menurunnya jumlah target dan capaian peta potensi PMI di Jawa Barat karena kurangnya informasi lowongan pekerjaan yang menarik minat CPMI. Namun, pada tahun 2022 ini pelayanan Jobs Info yang datang langsung ke Kantor BP3MI sudah mulai meningkat karena banyaknya peminat yang ingin bekerja ke luar negeri sudah mengetahui banyaknya Negara Penempatan yang membuka lowongan pekerjaan.
- d. Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) karena nilai penyerapan anggarannya tinggi. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah dibuat pada awal tahun.

B. SARAN

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan BP3MI Jawa Barat akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pusat dan daerah.



LAMPIRAN

**TABEL
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN**

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	3	2	4	8	6	7	8	9	10	11
			2.500 orang	1.735 orang	2.500 orang	3.612 orang	2.500 orang	2.771 orang	2.500 orang	4.238 orang
			22,35%	25,12%	22,35%	23,25%	22,35%	52%	22,35%	29,72%
			10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang	10.000 orang
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	50 orang	12 orang	7 orang	12 orang	0 orang	13 orang	74 orang	13 orang	140 orang
			30 orang	75 orang	30 orang	41 orang	35 orang	58 orang	35 orang	87 orang
			20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
			96	17,62	96	30,90	96	49,05	96	70,03
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai IKPA	86	86	59,51	86	90,45	86	95,23	86	95,58
			92	88,03	92	96,64	92	96,64	92	96,64
			92	92	92	92	92	92	92	92
			92	92	92	92	92	92	92	92



TABEL
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 BERDASARKAN REALISASI TRIWULAN

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022				Capaian (%)
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	10.000 orang	1.735 orang	3.612 orang	2.771 orang	4.238 orang	123,56
	Penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia	22,35%	25,12%	23,25%	52%	29,72%	21,21
	Pekerja Migran Indonesia nonprosedural yang berhasil dicegah	50 orang	7 orang	0 orang	74 orang	149 orang	312
	Fasilitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia	130 orang	75 orang	41 orang	58 orang	87 orang	156,15
	Pembudayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya	20 orang	-	20 orang	-	-	100
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Capaian Kinerja Anggaran	96	17,62	30,90	49,05	70,03	72,95
	Nilai IKPA	86	59,51	90,45	95,23	95,63	111,26
	Nilai Zona Integritas	92	88,03	96,64	96,84	96,64	105,04